

**EVALUATION OF THE GOVERNMENT RICE RESERVE POLICY (CBP) IN
STABILIZING FOOD SUPPLY AND PRICES (SPHP) AT THE JAKARTA AND
BANTEN REGIONAL OFFICE OF PERUM BULOG**

**EVALUASI KEBIJAKAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH (CBP) DALAM
STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN (SPHP) DI PERUM BULOG
KANTOR WILAYAH JAKARTA DAN BANTEN**

Fauziatul Ifa¹, Neneng Sri Rahayu²

Program Studi Administrasi Pembangunan Negara, Jurusan Manajemen Kebijakan Publik,
Politeknik STIA Lan Jakarta^{1,2}

fauziatulifa4@gmail.com¹, neneng.rdn@gmail.com²

ABSTRACT

This study aims to assess the Government Rice Reserve (CBP) policy in Stabilizing Food Supply and Prices (SPHP) at Perum BULOG DKI Jakarta and Banten Regional Offices. The theory used is the Policy Evaluation theory developed by William N. Dunn 2003, there are 6 (six) criteria, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and appropriateness. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. The techniques used for data collection are: interviews, observations and documentation studies. This study uses structured interviews conducted with 10 (ten) key informants who have knowledge and direct involvement. The conclusion of this study is that assessed from the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, similarity, responsiveness, and feasibility based on the results of the study can be concluded that it is not optimal and there are still several challenges faced, namely: effectiveness is not optimal because SPHP rice is mostly distributed to modern retailers, the cost of distributing SPHP rice is quite large, bank credit facilitation burdens financial and operational cash flow, there is rice of declining quality, slow distribution, the availability of SPHP rice in modern retailers is not optimal, access to the rice distribution network in DKI Jakarta and Banten is rather difficult, there are changes in channels that are different from the technical guidelines in 2024 and 2025, and people's preference for local rice. The suggestions of this study are; collaborating with BUMD or food stations to accelerate SPHP distribution, conducting supervisory synergy with the food task force and law enforcement officers to take corrective steps for indications of unreasonable food price increases, improving distribution to markets and other channels to avoid emptiness, collaborating with Himbara for the capitalization process in rice sales channels, improving the quality of SPHP rice and building public trust.

Keywords: Policy Implementation, Government Rice Reserve (CBP) Policy, Stabilizing Food Supply and Prices (KPSH).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten. Teori yang digunakan yaitu teori Evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn 2003 ada 6 (enam) kriteria yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan kelayakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu: wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dilakukan dengan 10 (sepuluh) orang *key informant* yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung. Kesimpulan penelitian ini bahwa dinilai dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan belum optimal dan masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi yaitu: efektivitas belum optimal karena beras SPHP kebanyakan disalurkan ke ritel modern, biaya penyaluran beras SPHP cukup besar, fasilitasi kredit perbankan yang membebani *cashflow* keuangan dan operasional, terdapat beras turun mutu, penyaluran yang lambat, ketersediaan beras SPHP di ritel modern belum optimal, akses masuk ke jaringan distribusi beras di DKI Jakarta dan Banten agak susah, adanya perubahan saluran yang berbeda dari juknis tahun 2024 dengan tahun 2025, dan preferensi masyarakat lebih memilih beras lokal. Saran penelitian ini yaitu; bekerjasama dengan BUMD atau *food station* untuk mempercepat penyaluran SPHP, melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan Langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan, perbaikan distribusi ke pasar dan saluran lainnya

agar tidak terjadi kekosongan, bekerja sama dengan Himbara untuk proses permodalan pada saluran penjualan beras, meningkatkan kualitas beras SPHP dan membangun kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

PENDAHULUAN

Administrasi pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu administrasi publik memiliki keterkaitan dengan proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan metode-metode yang digunakan dari suatu program pembangunan untuk melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan guna mencapai sasaran Pembangunan (Ngusmanto, 2015). Salah satu kebijakan administrasi pembangunan sebagai prioritas nasional yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 melalui asta cita kedua adalah memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Perpres, 2025). Pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kebutuhan utama manusia dan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Kewajiban negara untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan secara merata, cukup, bermutu, aman, dan bergizi seimbang dengan memanfaatkan budaya lokal, sumber daya, dan kelembagaan (Pangan, 2012).

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan produsen dan konsumen beras, yang sekaligus sebagai kawasan rawan bencana alam. Guna penanganan kebutuhan darurat negara anggota ASEAN yaitu Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand bersepakat untuk membentuk cadangan beras ASEAN dengan penandatanganan *Aggrement on the*

ASEAN Food Security Reserve (AFSR) di New York pada tahun 1979. Perkembangan AFSR semakin pesat sehingga pada tahun 2012 sepuluh anggota negara ASEAN secara resmi mendirikan *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR)*. Enam aspek yang perlu ditangani dalam kesepakatan tersebut yaitu memperkuat basis produksi beras masing-masing anggota, mengadopsi kebijakan dan mengola cadangan beras secara efektif, mencegah adanya kehilangan hasil, stabilisasi harga beras, meningkatkan gizi dan konsumsi terutama kelompok rawan, dan meningkatkan pendapatan petani (Hermanto, 2014).

Strategi penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencakup tiga tahap utama: pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Pengadaan dilakukan melalui contract farming, kemitraan, atau closed loop, serta dapat berasal dari luar negeri jika produksi domestik tidak mencukupi. Pengelolaan meliputi pemeliharaan, penyimpanan, pengolahan, pemerataan, dan pelepasan stok. Penyaluran CBP bertujuan mengatasi masalah pangan, stabilisasi pasokan dan harga (SPHP), penanggulangan bencana, serta kerja sama internasional.

CBP saat ini didominasi oleh cadangan beras dengan jumlah minimal 2.400.000 ton dan stok akhir tahun minimal 1.200.000 ton. Harga dianggap stabil jika tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), yang bervariasi menurut wilayah, misalnya Rp12.500/kg untuk beras medium di Jawa dan Rp13.500/kg di Maluku dan Papua.

Hingga 15 Desember 2024, pengadaan beras dalam negeri mencapai 1.259.080 ton, sedangkan impor

mencapai 3.415.958 ton dari negara seperti Vietnam dan Thailand. Program SPHP yang dimulai sejak 2022 bertujuan menekan gejolak harga dan menyalurkan beras melalui pasar tradisional, ritel modern, serta platform digital.

Realisasi penyaluran CBP terus meningkat, dengan SPHP mencapai 1.355.117 ton hingga akhir 2024. Sebagian besar disalurkan melalui pengecer (65,7%). Bantuan pangan mencapai 1.961.370 ton dalam tiga tahap, sementara penyaluran untuk tanggap darurat bencana sebesar 381 ton.

Pelaksanaan kebijakan pengelolaan cadangan beras pemerintah saat ini dari kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan masih belum optimal. Stok beras yang masih kurang mengganggu efektifitas mekanisme pengadaan dan penyaluran beras terutama terkait Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Produksi dalam negeri menurun sehingga menyebabkan sulitnya pemenuhan pengadaan beras dari produksi dalam negeri. Perubahan sistem pendanaan dari sistem persediaan menjadi sistem penggantian akan menambah beban pembiayaan bagi perum BULOG. Penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) oleh Badan Pangan Nasional dinilai kurang efektif dalam stabilisasi harga beras (Rusono, 2019).

Stok beras yang belum optimal mengganggu efektivitas pengadaan dan penyaluran, terutama dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pada Januari–Oktober 2024, neraca produksi-konsumsi beras defisit 1,66 juta ton (-58,24%) dibanding tahun sebelumnya. Dengan stok cadangan 1,34 juta ton, impor belum terealisasi 1,1 juta ton, dan kebutuhan SPHP serta bantuan pangan 874 ribu ton, stok akhir tahun diperkirakan 1,5 juta ton. Padahal dibutuhkan 2,5 juta ton, sehingga masih

kurang 1 juta ton yang harus dipenuhi melalui impor.

Meski stok Bulog pada September 2025 mencapai 3,87 juta ton (melebihi batas minimal 2,4 juta ton), tantangan muncul dalam percepatan penyaluran untuk menekan biaya simpan dan menjaga kualitas. Produksi domestik yang tidak merata juga menyulitkan pemenuhan kebutuhan, sehingga efisiensi logistik oleh Bulog sangat penting. Perubahan sistem pendanaan dari persediaan ke penggantian memperberat biaya karena bergantung pada pinjaman bank dan proses penggantian pemerintah yang lama.

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dinilai kurang efektif karena harga pasar melebihi HET akibat lemahnya pengawasan. Pengelolaan CBP menjadi upaya pemerintah menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, pengawasan distribusi dan kepatuhan HET masih menjadi tantangan. Dalam RPJMN 2025–2029, cadangan pangan menjadi prioritas untuk menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi. Evaluasi SPHP penting dilakukan terutama di Jakarta yang bergantung pada pasokan luar karena produksi padi yang rendah.

Kebijakan CBP dalam SPHP perlu diteliti secara mendalam karena menyangkut beberapa aspek penting terkait ketahanan pangan nasional melalui strategi 4K: Ketersediaan, Keterjangkauan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. Lokasi kajian evaluasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khususnya di wilayah Jakarta yang menjadi barometer harga pangan dan bukan daerah produsen beras sehingga ketersediaan beras menjadi faktor penting bagi pemerintah. Provinsi DKI Jakarta sebagai sebuah kota metropolitan, memiliki lahan pertanian

yang sangat terbatas diikuti dengan produksi (padi) yang juga rendah.

Luas lahan panen di DKI Jakarta sebesar 498 ha di tahun 2024 dan cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Produktivitas lahan mencapai 46 ku/ha lebih rendah dari nasional 52,90 ku/ha. Lahan padi di DKI Jakarta terbesar terletak di Jakarta Utara (443 ha) diikuti dengan Jaktim (28 ha) dan Jakbar (27 ha).

Seiring jumlah lahan pertanian yang cenderung menurun, produksi padi turun menjadi 1.360 ton (setara beras) pada tahun 2024, dibandingkan kebutuhan 941.791 ton. Produksi beras di Jakarta hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Jakarta 2.600 ton per hari, walaupun produksi optimal dari sepanjang tahun.

Sedangkan Banten berbatasan langsung dengan Jakarta sehingga fluktuasi pasokan dan harga beras memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap Jakarta dan merupakan daerah rawan pangan yang rentan terhadap gejolak harga dan pasokan.

Produksi padi di provinsi banten dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 883.128 ton pada tahun 2024. Provinsi Banten termasuk dalam daerah yang harga beras melebihi HET (12.500) yaitu 13.750 dan diperlukan adanya intervensi untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen.

METODE

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian tersebut digunakan karena penelitian ini dalam praktiknya tidak terbatas pada pengumpulan data saja tetapi juga menganalisis data mengenai Evaluasi Kebijakan Cadangan

Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah Jakarta dan Banten secara lebih mendalam sesuai dengan karakteristik dalam penelitian kualitatif.

Bogdan dan Taylor (1982) dalam (Abdussamad & Sik, 2021) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic. Hal ini sejalan dengan Evaluasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Perum BULOG Kantor Wilayah Jakarta dan Banten yang perlu didukung oleh data primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer dapat berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan berupa dokumen tertulis, gambar, dan foto-foto. Dalam pengumpulan data menggunakan alat-alat tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari panduan wawancara, buku catatan, dan kamera digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) di Perum Bulog Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten

Efektivitas

Pada pembahasan sebelumnya bahwa efektifitas mengukur seberapa besar Cadangan Beras Pemerintah

(CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berhasil mencapai tujuan mengatasi atau mencegah gejolak harga beras, mendukung pengendalian inflasi, menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga, dan menjaga daya beli yang terjangkau bagi masyarakat.

Indikator ukuran efektifitas kebijakan CBP dalam SPHP salah satunya adalah berhasil mencapai tujuan mengatasi atau mencegah gejolak harga beras. Gejolak harga beras merupakan peningkatan harga beras yang mencapai 5 % (lima persen) di tingkat konsumen dan/atau melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dapat meresahkan masyarakat dan berlangsung selama paling singkat 1 (satu) minggu. Stabilisasi harga pangan yang mendukung ketahanan pangan adalah terjaganya pasokan dan harga pangan melalui pelaksanaan kebijakan dengan indikator koefisien variasi harga pangan yang menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk komoditas berbasis tanaman pangan seperti beras.

Indikator ini belum optimal karena masih terdapat beberapa tantangan seperti harga beras medium di wilayah DKI Jakarta dan Banten masih diatas HET namun masih dalam kategori stabil.

Harga beras masih dalam kategori stabil dengan andil inflasi dibawah 0,05 (mtm) walaupun harga di pasar menunjukkan diatas HET namun tidak terjadi fluktuasi harga yang signifikan. Pada tanggal 2 Juni 2025, pedagang beras diresahkan dengan turunnya pembelian dan kenaikan harga beras rata-rata Rp1.000 untuk beras medium mencapai Rp13.500. Harga tersebut telah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga pemerintah diperlukan kembali untuk menyalurkan beras SPHP.

Perkembangan harga beras medium pada tanggal 11 Juni 2025 semua zona sudah di atas HET, zona 1 yaitu Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi sebesar Rp 13.371/kg (naik 6,97 % dari HET 12.500/kg), zona 2 yaitu sematera (selain sumsel dan lampung), NTT, dan Kalimantan sebesar Rp 14.158/kg (naik 8,08 % dari HET 13.100), zona 3 yaitu Maluku dan Papua sebesar Rp 15.817/kg (naik 17,58 % dari HET 13.500). Pada tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan data panel harga pangan terdapat 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) kabupaten/kota dengan harga beras premium diatas HET dan 413 (empat ratus tiga belas) kabupaten/kota dengan harga beras medium diatas HET dan perlu adanya intervensi untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen termasuk daerah DKI Jakarta dan Banten.

Perkembangan harga beras medium maupun premium di daerah DKI Jakarta dan Banten setelah berakhirnya masa panen raya di tingkat konsumen mengalami tren kenaikan.

Kenaikan beras secara mikro akan memberikan dampak pada peningkatan pengeluaran rumah tangga/keluarga atas beras yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga, sedangkan secara makro kenaikan beras akan berdampak pada inflasi dan tingkat kemiskinan. Berikut merupakan perkembangan harga beras di Wilayah Jakarta pada tingkat konsumen dari tahun 2024 hingga Agustus 2025:

Harga beras medium di wilayah Jakarta pada tahun 2024 relatif stabil dengan rata-rata Rp.13.517. Awal tahun 2025 harga beras mengalami kenaikan terutama pada Bulan Maret sebesar Rp. 13.826. Pada tanggal 14 September 2025 dilakukan intervensi pasar dengan penyaluran SPHP harga beras medium khususnya di Zona 1 sebesar Rp. 12.250

/kg, cenderung stabil dan berada dibawah HET.

Pengendalian inflasi merupakan indikator pengukuran efektifitas kebijakan CBP dalam SPHP khususnya di Wilayah DKI Jakarta dan Banten. Inflasi merupakan kenaikan secara umum harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu dan mengakibatkan kenaikan pada barang lainnya. Sebaliknya deflasi merupakan penurunan laju inflasi.

Kebijakan CBP dalam SPHP sangat efektif untuk pengendalian inflasi walaupun efeknya tidak secara langsung dan masih banyak faktor lainnya. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK terdiri dari 11 yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau; kelompok perumahan air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga; kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga; kelompok transportasi; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; penyediaan makanan dan minuman restoran; kelompok pendidikan; dan perawatan pribadi dan jasa lainnya. Selain pengelompokan tersebut, inflasi juga dikelompokkan menjadi inflasi inti dan inflasi non inti. Inflasi inti didapat dari komponen inflasi yang pergerakannya cenderung stabil. Biasanya dipengaruhi oleh faktor interaksi permintaan-penawaran, ekspektasi inflasi di masa depan, nilai tukar, perkembangan ekonomi global dan harga komoditi internasional. Inflasi non-inti cenderung memiliki kecenderungan volatilitas yang tinggi. Beberapa komponen inflasi non inti meliputi *volatile food* atau inflasi komponen bergejolak yang dipengaruhi oleh shocks (kejutan) seperti pada kelompok makanan dan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah

(*Administried Prices*) yang di pengaruhi oleh shocks (kejutan) dari kebijakan harga yang diambil oleh pemerintah.

Pada Juli 2025 secara nasional terjadi inflasi sebesar 0,30% (mtm) atau 2,37% (yoy) dan 1,69% (ytd). Komoditas penyumbang inflasi (mtm): beras, tomat, bawang merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan ikan segar. Komoditas penahan inflasi (mtm): tarif angkutan udara, ketimun, bawang putih, jeruk, dan kacang panjang. Tingkat inflasi berdasarkan komponen: *Volatile Food/VF* mengalami inflasi sebesar 1,25% (mtm) atau 3,82% (yoy). Inti mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm) atau 2,32% (yoy). *Administered Price/AP* mengalami inflasi sebesar 0,09% (mtm) atau 1,32% (yoy). Inflasi Juli 2025 tercatat sebesar 0,30% (mtm) lebih tinggi bila dibandingkan bulan sebelumnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil inflasi terbesar yakni 0,22% dengan komoditas yang mendorong inflasi yaitu beras, cabai rawit, bawang merah dan tomat. Harga beras juga kembali mengalami kenaikan yang disebabkan terbatasnya produksi setelah masa panen Maret-April yang lalu. Harga beras diperkirakan akan kembali turun pada Agustus dengan adanya panen gadu.

Inflasi di DKI Jakarta pada bulan Juli 2025 sebesar 0,11 % (mtm), sedangkan secara tahun ke tahun mengalami inflasi sebesar 2,25 % (yty). Secara m-to-m penyumbang inflasi utama pada bulan Juli dengan andil 0,06 % adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Bawang merah dan cabai rawit merupakan komoditas utama penyumbang inflasi. Perkembangan inflasi/indeks harga konsumen Provinsi Banten Pada Juli 2025 sebesar 0,21 % (mtm), sedangkan secara tahun ke tahun sebesar 2,29 %. Penyumbang andil inflasi utama secara

m-t-m pada bulan Juli 2025 dengan andil inflasi 0,15 % adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Secara umum komoditas yang menjadi penyumbang inflasi yaitu tomat, bawang merah, cabai rawit, bensin, dan telur ayam ras. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa beras tidak termasuk kedalam andil utama inflasi sehingga dapat disimpulkan bahwa harga komoditas beras masih stabil.

Inflasi di DKI Jakarta sebesar 2,25 % (yty) masih berada dalam rentang target inflasi pada tahun 2025 yaitu $2,5 \pm 1\%$. Hal tersebut dicapai dengan intervensi pemerintah melalui penyaluran SPHP beras. Penyaluran beras SPHP dimulai tahun 2022, dan selama tahun 2022-2024 penyaluran SPHP selalu lebih besar dibandingkan serapan Bulog.

Target penyaluran SPHP beras dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Target penyaluran SPHP Beras di Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten pada Juli 2025 sebesar 12.660.370/kg, sedangkan pada bulan Agustus 2025 sebesar 12.400.705/kg. Selama tahun 2022-2024, penyaluran SPHP pada kisaran 1,2-14 juta ton, sedangkan serapan Bulog 0,99 -1,3 juta ton.

Tahun 2025 penyaluran SPHP menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan selama Maret 2025 terdapat operasi pasar murah pangan pada Ramadan dan Idul Fitri dengan realisasi penyaluran sebesar 78,291 ton. Pada April dan Mei 2025 tidak ada penyaluran beras SPHP, menunjukkan produksi dan beras yang beredar di masyarakat masih melimpah (Maret dan April merupakan panen raya padi). Menurut pendapat dari K2 seharusnya penyaluran beras dilakukan sepanjang tahun walaupun terdapat panen raya untuk mencegah kenaikan harga beras.

Pelaksanaan ketentuan penyaluran SPHP pada tingkat konsumen periode Juli sampai dengan Desember 2025 tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 215 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPHP di Tingkat konsumen Periode Juli sampai Desember Tahun 2025. Maksud penyusunan petunjuk teknis tersebut agar tata Kelola pelaksanaan SPHP berjalan dengan baik, tujuan dan sasaran dapat tercapai sesuai harapan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pelaksanaan SPHP beras dengan menggunakan CBP berasal dari pembelian langsung oleh pemerintah, pembelian stok komersial Perum Bulog dan pengadaan luar negeri jika produksi dalam negeri tidak mencukupi. Perum Bulog mengeluarkan SPHP beras dalam bentuk kemasan 5 (lima) kg, paling sedikit memuat informasi mengenai berat bersih, jenis pangan, dan kelas mutu.

Hasil monitoring dari Dinas ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta bahwa di DKI Jakarta penyaluran SPHP beras telah sesuai juknis yaitu dengan kemasan 5 (lima) kg dan kemasan tidak bisa dibuka, jadi pedangan lebih berhati-hati agar tidak terkena sanksi.

Ketepatan sasaran penyaluran beras SPHP di Perum Bulog DKI Jakarta masih belum optimal karena beras SPHP kebanyakan disalurkan ke ritel modern maupun distributor sedangkan survei harga dari Badan Pusat Statistik di pasar-pasar tradisional maupun pasar jaya.

Adanya upaya verifikasi mitra Perum Bulog untuk pencegahan penyimpangan dari Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta agar tepat sasaran. Verifikasi mitra Perum BULOG untuk instansi pemerintah dan BUMN, paling sedikit dapat memuat informasi tentang nama outlet, nama pemilik/penanggung jawab outlet, alamat dan titik koordinat

outlet, foto outlet dan kapasitas Gudang/penyimpanan. Sebagai pelaksana SPHP Beras mitra Perum BULOG mendapatkan surat penetapan sebagai mitra penyaluran dan memiliki kewajiban menjual beras dengan harga maksimal sesuai harga eceran tertinggi. Perum Bulog bertanggung jawab memantau dan evaluasi serta pengendalian terhadap mitra perum BULOG hingga di tingkat konsumen.

Dampak positif dari penyaluran beras SPHP adalah dapat menjaga daya beli masyarakat dan menjaga harga beras agar tidak melonjak tinggi. Salah satu indikator dari kesehatan ekonomi merupakan daya beli masyarakat. Turunnya daya beli menjadi indikator permasalahan ekonomi.

Efisiensi

Pada kriteria efisiensi menilai apakah sumber daya yang dialokasikan untuk penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah digunakan secara optimal. Selain itu untuk menilai seberapa besar perbandingan hasil yang dicapai.

Terkait biaya penyaluran SPHP belum efisien. Biaya distribusi ketika ada retur dari pengecer maupun toko ritel atau saluran lainnya tidak dapat ditagihkan ke anggaran pemerintah. Selain itu dalam mekanisme pelaksanaan beras yang digunakan dalam bentuk kemasan 5 (lima) kg sedangkan pengadaan beras dari produksi dalam negeri dan dari impor merupakan beras dengan kemasan 50 kg, jadi membutuhkan biaya dan waktu yang lama untuk *repack* dari kemasan 50 kg menjadi 5 kg. Hal ini dianggap kurang efisien.

Perbandingan biaya yang dikeluarkan dari pengadaan, penyaluran, dan penyimpanan CBP dengan manfaat/hasil yang dicapai tidak bisa

dibandingkan pasti perum bulog mengalami kerugian karena merupakan penugasan dari pemerintah.

Kebutuhan anggaran untuk penyaluran beras SPHP 1,3 juta ton senilai 1,3 triliun periode Juni-Desember 2025. Pelaksanaan penyaluran setelah proses revisi anggaran belanja (ABT) disetujui dan anggaran telah masuk di BA 125.

Biaya kebutuhan penyaluran beras SPHP menurut wilayah yang paling besar pada zona 1 yaitu sebesar Rp965.377.795.530, diikuti oleh zona 2 sebesar Rp272.387.154.680, dan zona 3 sebesar Rp69.390.063.137, untuk biaya pengawasan, pemantauan dan revidi sebesar Rp1.961.920.000 dengan total kebutuhan Rp1.309.116.933.348. Biaya penyaluran di DKI Jakarta dan Banten cukup besar karena berada di zona 1 dan penduduk yang cukup padat.

Biaya penyaluran SPHP dihasilkan dari jumlah volume beras SPHP di kali dengan selisih harga eceran tertinggi dikurangi harga Af gudang. Harga eceran tertinggi beras medium berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Harga Eceran Tertinggi. Harga eceran tertinggi wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Sulawesi sebesar Rp12.500. Sedangkan untuk wilayah Aceh, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan sebesar Rp13.100. Pada Wilayah Papua dan Maluku, harga eceran tertinggi sebesar Rp13.500/kg.

Harga penjualan SPHP beras af Gudang sebagai berikut: (1) wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Bali sebesar Rp11.000/kg; (2) wilayah Sumatera kecuali Sumatera Selatan dan Lampung, Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp11.300/kg;

(3) wilayah Maluku dan Papua sebesar Rp11.600/kg.

Sepanjang pelaksanaan penugasan, perum Bulog masih menggunakan fasilitas kredit perbankan yang sangat membebani *cashflow* keuangan dan operasional perum Bulog, seperti fasilitas subsidi bunga yang baru jalan tahun 2024. Perlu percepatan pembayaran atas piutang kepada pemerintah dan diaturnya mekanisme tata cara pembayaran atas penugasan pemerintah kepada perum bulog.

Sesuai pendapat diatas dapat disimpulkan saat ini Perum Bulog melakukan pengadaan pembelian cadangan beras pemerintah (CBP) dengan pinjaman bank komersial. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme penggantian oleh pemerintah setelah disalurkan dan dilaksanakan reviu oleh APIP/BPKP dengan pelaksanaan periodik (lebih dari 1x reviu dalam 1 tahun) dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga berdampak pada beban bunga yang tinggi karena stok yang disimpan dan proses penggantian dari pemerintah memakan waktu yang lama. Walaupun sudah ada dana OIP namun tidak mencukupi untuk kebutuhan penyaluran CBP secara keseluruhan dan hanya bisa menutup 16 % dari kebutuhan dana.

Penyaluran beras SPHP mempertimbangkan batas waktu simpan cadangan beras pemerintah yang idealnya tidak lebih dari 4 (empat) bulan. CBP yang mengalami atau berpotensi penurunan mutu ketika secara visual berwarna kusam, timbulnya aroma apek, munculnya serangga hama Gudang seperti kutu atau jenis lainnya, dan butiran beras remuk atau berdebu. Kondisi saat ini sebagian besar sudah melebihi 4 (bulan) bahkan ada yang lebih dari 12 (bulan). Jadi dapat menimbulkan kerusakan ketika beras SPHP telah disalurkan. Penyebab kerusakan beras

yang disalurkan karena lokasi gudang, masa simpan yang cukup lama, dan jumlah penyaluran yang belum massif.

Kecukupan

Pada kriteria kecukupan untuk menilai apakah volume Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) memadai untuk merespon kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga sepanjang tahun.

Ketersediaan pasokan/stok beras merupakan salah satu indikator kecukupan kebijakan CBP dalam SPHP. Perkembangan stok beras Bulog Januari 2021 sampai dengan Oktober 2024 kurang dari 1,5 juta ton, bahkan November 2022 sampai dengan April 2024 kurang dari 400.000 ton. Stok beras di Bulog mulai meningkat signifikan Desember 2024 menjadi 1,79 juta ton. Hal ini sesuai dengan jumlah minimal stok akhir CBP tahun 2024 sebesar 1.2 juta ton.

Stok CBP hingga Mei 2025 terus meningkat menembus angka 4 juta ton. Stok beras Perum Bulog per 10 Juni 2025 tercatat 4,1 juta ton dengan 43,7 % atau sekitar 1,78 juta ton usia simpan lebih dari 4 bulan. Usia simpan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog maksimal 4 (empat) bulan.

Stok beras di gudang bulog seluruh kantor wilayah yang ada di Indonesia total stok per 24 September 2025 mencapai 3.877.703 ton. Hal ini sudah melebihi minimal total stok yang dikelola perum Bulog sebesar 2.400.000 ton. Stok beras terbanyak berada di kanwil Jawa Timur sebesar 943.534 ton dengan pengadaan beras dalam negeri sebesar 659.244 ton dan beras yang beras dari luar negeri sebesar 284.290 ton. Stok Beras terendah berada di kantor wilayah Bengkulu dengan total stok 6.759 ton dengan pengadaan beras dalam negeri sebesar 4.257 ton dan pengadaan

luar negeri sebesar 2.499 ton. Stok Beras di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten sebesar 325.542 ton. Stok beras di gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten lebih banyak dari pengadaan luar negeri sebesar 270.950 ton dibandingkan pengadaan dalam negeri sebesar 54.594 ton atau sekitar 83 % pengadaan beras berasal dari luar negeri.

Kecukupan volume beras di Perum Bulog tidak ada kendala yaitu sangat cukup namun penyalurannya yang masih lambat menyebabkan kualitas beras menurun jika disimpan terlalu lama dan menimbulkan biaya.

Jakarta memiliki kebutuhan pangan yang sangat tinggi, ditengah keterbatasan lahan pertanian. Hal ini mengakibatkan 99 % pasokan di DKI Jakarta bersumber dari wilayah lain. Peran Jakarta sebagai hub nasional dan penopang Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). Sebagian besar pasokan pangan strategis (beras) di Jakarta diperoleh dari pulau Jawa dan didistribusikan ke wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan PT. Food Station Tjipinang Jaya yang bergerak dalam bidang penjualan, distribusi, pergudangan dalam resi gudang, jasa pergudangan, pengangkutan bahan pangan (beras) dan jasa pertokoan. Fungsi strategis PT. Food Station Tjipinang Jaya sebagai pilar ketahanan pangan, pusat perdagangan beras, dan instrumen pengendalian harga beras di Wilayah DKI Jakarta dan acuan harga beras secara nasional.

Stok beras pada tanggal 1 Juni 2025 di PT. Food Station Cipinang sebanyak 45.638 ton. Secara umum volume pemasukan dan pengeluaran beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta memiliki pola yang beriringan dengan kisaran 1-3 ribu ton per hari kerja, kurang dari 500 ton pada hari libur. Namun terjadi lonjakan yang

cukup signifikan pada volume pengeluaran beras tanggal 28 Mei 2025 mencapai 11,4 ribu per hari dan berdasarkan data tujuan daerah pengeluaran tercatat 2.369 ton (20, 76 %), selebihnya sebesar 9.041 ton (79, 24 %) tidak ada catatan dan merupakan anomali. Hal ini menyebabkan stok di PIBC mulai 28 Mei 2025 menurun menjadi 46.551 ton yang sebelumnya sekitar 55.853 ton, seharusnya menjadi 55.592 ton.

Selisih beras merupakan hasil dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran beras. Pemasukan beras berasal dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sulawesi, dan Lampung.

Total penyaluran beras SPHP dari bulan Januari sampai Desember Tahun 2024 realisasi penyaluran sebesar 318.999.601 kg. Penyaluran tertinggi terjadi pada bulan Juli 2025 sebesar 21.190.760 kg. Penyaluran terendah pada bulan April sebesar 7.691.465 kg.

Pada tahun 2025 SPHP tidak dilakukan sepanjang tahun, hanya dilakukan pada bulan Januari, Februari, Maret, Juli, Agustus, September, Oktober dan November. Penyebabnya karena menunggu penugasan dari pemerintah dalam kesepakatan rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Realisasi total sampai 24 September 2025 sebesar 21.723.055.

Ketentuan penyaluran SPHP beras untuk pengecer di pasar rakyat, Pemerintah Daerah melalui outlet pangan binaan, maupun koperasi dengan melakukan pembelian maksimal 2 (dua) ton per pembelian, dan melakukan pembelian kembali dengan mempertimbangkan ketersediaan stok sesuai pelaporan yang disediakan Perum Bulog pada sistem informasi elektronik.

Terdapat pembatasan pre order beras sebanyak 2 (dua) ton setiap pre order dan dengan jumlah stok SPHP yang cukup banyak seharusnya diiringi

dengan jumlah penyaluran SPHP yang massif. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah volume penyaluran maupun memperluas kanal saluran distribusi.

Kesamaan

Pada kriteria kesamaan untuk menganalisis pendistribusian/penyaluran manfaat dari kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara adil, mudah, cepat, murah, dan merata kepada masyarakat menengah kebawah.

Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah terdistribusi adil, merata.

Berikut merupakan gambaran ketersediaan beras di ritel modern dengan harga penjualan sebesar 62.500 dengan kemasan 5 kg, sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) di wilayah DKI Jakarta sebesar 12.500 per kg.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada tanggal 17 Juli 2025 di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pendistribusian beras SPHP dapat melalui beberapa saluran antara lain Instansi Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara. BUMN terdiri dari ID. Food, Perum Bulog, PT. Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company, dan PT. Perkebunan Nusantara. Sedangkan dari instansi pemerintah dapat meliputi TNI, Kemeterian Lembaga, POLRI dan Lainnya. Penyaluran melalui BUMN dapat dilakukan oleh outlet BUMN sebagai pengecer atau penjualan langsung kepada konsumen. Penyaluran instansi pemerintah dapat dilakukan oleh outlet instansi pemerintah atau koperasi sebagai pengecer, Gerakan Pangan Murah (GPM) atau penjualan langsung kepada konsumen.

Penyaluran SPHP beras menurut saluran di wilayah DKI Jakarta dan Banten pada tahun sebesar 318.999.601 kg. Total saluran penjualan SPHP beras berada pada pengecer di pasar sebesar 44.573.605 kg dan paling rendah penyaluran penjualan pada *e-commerce* sebesar 14.490 kg.

Pada tahun 2024, saluran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan SPHP beras dengan melakukan operasi pasar di tingkat eceran, mitra perum bulog atau distributor. Dilakukan dipasar tradisional, perdagangan melalui sistem elektronik, toko modern, dan tempat yang mudah dijangkau konsumen. Selain itu dapat melalui pengecer (pedagang eceran, toko pangan kita, swalayan, rumah pangan kita, koperasi), satuan tugas yang dibentuk oleh perum Bulog, pemerintah daerah melalui program stabilisasi harga dan pasar murah, perdagangan melalui sistem elektronik, dan sinergi BUMN pangan melalui outlet binaannya. Hal ini menjadi kendala perum bulog dalam penyaluran karena adanya verifikasi baru lagi saluran dan nama-nama distributor yang berubah.

Dalam hal ini, Dinas Ketahanan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta juga dapat melakukan verifikasi mitra perum Bulog sebagai penyalur beras dan memberikan usulan penyesuaian alokasi penyaluran SPHP beras kepada Kepala Badan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Pelayanan publik yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta untuk memantau SPHP beras sampai di tangan konsumen dilakukan di pasar-pasar.

Responsivitas

Pada kriteria responsivitas digunakan untuk menilai seberapa responsif pelaksana kebijakan dalam menanggapi kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Penyaluran SPHP sudah sesuai kebutuhan karena telah dilakukan pengemasan ulang dari 50 kg menjadi 5 kg. Namun, masih ada kendala terkait penyesuaian terhadap preferensi masyarakat karena pengadaan beras dari petani maupun dari luar negeri tidak sesuai dengan kategori varietas jadi ada beras yang sesuai preferensi maupun tidak sesuai.

Preferensi masyarakat di Wilayah DKI Jakarta dan Banten lebih cenderung mengonsumsi beras yang pulen jadi lebih banyak memilih beras dengan kualitas premium dari pada medium khususnya di Daerah Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat sehingga SPHP beras kurang diminati di wilayah tersebut.

Ketika terjadi kelangkaan pasokan beras atau adanya fluktuasi harga beras Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga merespon hal tersebut dengan melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan berbagai stakeholder seperti Perum Bulog, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan pihak-pihak lain yang membidangi pangan.

Jadi perintah untuk penyaluran beras dan target yang akan disalurkan dilaksanakan pada rapat koordinasi terbatas yang dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Hasil rakortas tersebut akan dituangkan dalam surat keputusan Badan Pangan Nasional untuk penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi harga. Pemerintah daerah juga merespon cepat hal tersebut melalui rapat yang dilakukan daring maupun luring.

Kelayakan

Pada kriteria kelayakan akan mengevaluasi relevansi dan kesesuaian kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan visi misi

Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029 dalam konteks dinamika pasar, perubahan iklim, dan kondisi sosial saat ini.

Berdasarkan visi misi Presiden dalam RPJMN tahun 2025-2029 menuju Indonesia Emas Tahun 2025, pembangunan ketahanan pangan merupakan upaya untuk mendukung salah satu asta cita untuk mencapai swasembada pangan melalui, penjaminan ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan, memperkuat tata kelola pangan, memperpendek rantai distribusi, serta menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan.

Kesesuaian CBP dalam SPHP terletak pada pilar ketahanan pangan. Dalam mendukung pilar ketahanan pangan Perum bulog menjalankan berbagai kegiatan antara lain: (1) pilar ketersediaan, dengan melaksanakan komoditas pangan melalui pengadaan dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sehingga dapat mencukupi stok di masyarakat dan berfungsi sebagai jaminan harga pasar serta mendorong pembangunan melalui perluasan lapangan kerja; (2) pilar keterjangkauan, dengan menyalurkan dan menyediakan komoditas pangan bersubsidi bagi masyarakat dengan pendapatan rendah, memastikan harga jual yang terjangkau, dan memastikan ketersediaan beras di berbagai titik penjualan; dan (3) pilar stabilitas, dengan menyalurkan dan menyediakan komoditas pangan strategis untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga, serta meningkatkan kesiapan penanggulangan keadaan darurat, rawan pangan, dan bencana, melalui pengelolaan stok BULOG dan cadangan pangan pemerintah.

Mekanisme ketahanan pangan di ASEAN berupa cadangan pangan, integrasi perdagangan intraregional, dan sistem informasi untuk mencegah

gejolak harga pangan di masa mendatang. Sistem perdagangan pangan global yang stabil penting untuk memenuhi peningkatan preferensi konsumen yang semakin meningkat di Tengah keterbatasan sumber daya dan lahan yang dimiliki oleh negara-negara. Beberapa peristiwa geoekonomi dan geopolitik dalam beberapa tahun terakhir berdampak negatif terhadap sektor pangan di Asia Tenggara. Pertama, pada tahun 2020 terdapat pandemi covid memicu krisis Kesehatan, ekonomi, pangan hibrida. Kedua, invasi Rusia ke Ukraina pada Tahun 2022 menyebabkan harga beras internasional naik dari indeks 101,2 pada akhir Januari 2022 menjadi 110 poin pada akhir Juni 2022. Meskipun perang ini tidak melibatkan produsen utama beras, namun tetap mempengaruhi ketahanan pangan ASEAN. Pada bulan Oktober 2023 diikuti pecahnya konflik antara Israel dan Palestina. Pada tahun 2025, terdapat ketidakpastian ekonomi akibat perang tarif yang digulirkan oleh presiden AS Donald Trump.

Perbandingan kebijakan pengelolaan cadangan pangan di Indonesia dengan negara lain seperti India, dan Tiongkok. Pada bulan Juli 2023, India melakukan pembatasan ekspor beras karena harga beras di India mulai meningkat dengan banyaknya masyarakat yang mengonsumsi beras dari pada gandum. Di Tiongkok mengalami peningkatan stok pangan selama decade terakhir untuk beras, jagung, kedelai, dan gandum. Cadangan pangan Tiongkok untuk beras meningkat dari 42 juta ton pada tahun 2010 menjadi 168 juta ton pada tahun 2022. Kemampuannya untuk mengembangkan stok pangannya dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk membeli dalam jumlah besar.

Sementara di Jepang, ketahanan pangan dari tahun 1980 hingga 2022

menghadapi banyak tantangan. Penurunan produksi dan kualitas produk pertanian, serta faktor eksternal seperti fluktuasi pasar pangan global dan risiko geopolitik telah mempengaruhi ketahanan pangan Jepang. Strategi Jepang untuk menghadapi tantangan yang semakin besar di masa depan dengan terus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, mengembangkan varietas tanaman tahan hama, mendorong restrukturisasi industri, dan meningkatkan kerjasama internasional untuk memastikan ketahanan pangan serta perubahan iklim. (Montesclaros, 2025)

Di Malaysia, swasembada pangan terus menurun disebabkan oleh bencana alam seperti banjir yang membuat stabilitas ketahanan pangan rentan dan rantai pasok terganggu. Pandemi Covid juga menggarisbawahi peran penting lingkungan bisnis yang terbuka dan distribusi makanan yang tepat waktu untuk memenuhi permintaan. Ancaman utama ketahanan pangan adalah memastikan kemudahan akses terhadap pangan dan pentingnya jaring pengaman untuk mencegah kelaparan dan kerawanan pangan, dan bukan hanya fokus pada ketersediaan pangan. Sehingga strategi multi-pemasok diadopsi dalam upaya ketahanan pangan sebagai sumber daya cadangan untuk mengatasi hal yang tidak terduga.

Skor ketahanan pangan Indonesia 60,2 (63) masih tertinggal dibandingkan Singapura 73,1 (28), Malaysia 69,9 (41), dan Vietnam 67,9 (46), tetapi lebih baik dari negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand 60,1 (64), Filipina 59,3 (67), Myanmar 57,6 (72), Kamboja 55,7 (78), dan Laos 53,1 (81).

Untuk menilai kinerja dari Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten terkait Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menggunakan Cadangan Beras

Pemerintah (CBP) dengan menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas dan kelayakan.

Strategi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Dalam Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) Di Perum Bulog Kantor Wilayah Jakarta Dan Banten

Penyusunan Strategi menggunakan analisis SWOT (*Strengths*,

Weaknesses, *Opportunity*, dan *Threats*) adalah menggabungkan beberapa indikator pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Model yang digunakan penggabungan dengan memakai TOWS Matriks. Namun, tidak semua strategi yang disusun digunakan seluruhnya, yang digunakan merupakan strategi yang dapat memecahkan isu strategis.



Gambar 1. TOWS Matriks
Sumber: Rangkuti, 2006

- S-O strategis adalah penyusunan strategi menggunakan semua kekuatan untuk merebut peluang
- W-O strategis adalah penyusunan strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada
- S-T strategis adalah penyusunan strategi dengan menggunakan semua kekuatan dalam mengatasi ancaman
- W-T strategis adalah penyusunan strategi untuk meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman.

Strategi Evaluasi Kebijakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) diperlukan analisis WOT secara komprehensif yaitu dengan melakukan analisis faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan internal serta faktor eksternal terkait peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Kekuatan:
 - a. Jumlah stok CBP yang cukup besar
 - b. Jaringan Distribusi yang Kuat
 - c. Permintaan Konsumen yang tinggi
 - d. Dukungan regulasi pemerintah
2. Kelemahan

- a. Penyaluran beras di pasar, toko dan saluran lain masih rendah
 - b. Kapasitas gudang bulog terbatas
 - c. Sebagian Beras yang disalurkan rusak dan turun mutu.
 - d. Mekanisme penggantian biaya penyaluran SPHP cukup lama dan Biaya retur tidak dapat ditagihkan.
 - e. Perubahan saluran distribusi setiap tahun
 - f. Sentra *repacking* beras terbatas
 - g. Belum ada *benchmark* dengan negara lain
 - h. Verifikasi mitra perum bulog yang lambat.
3. Peluang
- a. Intervensi Pasar Mudah
 - b. Dukungan kerjasama dari BUMD dan Food Station
 - c. Integrasi dengan ritel modern
 - d. Pemanfaatan e-commerce
 - e. Dukungan kerjasama dengan bank Himbara terkait modal
4. Ancaman
- a. Pedagang lebih memilih pemasok besar selain perum bulog karena kemudahan pelayanan
 - b. Pedagang/distributor banyak yang menolak beras kemasan 5 kg
 - c. Preferensi masyarakat lebih memilih beras yang pulen
 - d. Inflasi beras tinggi dan Harga beras
- Analisis TOWS digunakan untuk menyusun formulasi strategi dengan cara memadukan SO strategy dengan memadukan kekuatan dengan peluang, ST strategy dengan memadukan kekuatan dan ancaman, WO strategy dengan memadukan kelemahan dengan peluang, dan WT Strategy dengan memadukan kelemahan dengan ancaman. Berikut analisisnya:

Tabel 1.

Internal	Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	1. Jumlah stok CBP yang cukup besar 2. Jaringan Distribusi yang Kuat 3. Permintaan Konsumen yang tinggi 4. Dukungan regulasi pemerintah 5. Adanya sistem pencatatan stok	1. Penyaluran beras di pasar, toko dan saluran lain masih rendah 2. Kapasitas gudang bulog terbatas 3. Sebagian Beras yang disalurkan rusak dan turun mutu. 4. Mekanisme penggantian biaya penyaluran SPHP cukup lama dan Biaya retur tidak dapat ditagihkan. 5. Perubahan saluran distribusi setiap tahun 6. Sentra <i>repacking</i> beras terbatas 7. Belum ada <i>benchmark</i> dengan negara lain 8. Verifikasi mitra perum bulog yang lambat.

External		
Peluang (Opportunities) 1. Intervensi Pasar Mudah 2. Dukungan kerjasama dari BUMD dan Food Station 3. Integrasi dengan ritel modern 4. Pemanfaatan e-commerce 5. Dukungan kerjasama dengan bank Himbara terkait modal	SO Strategy 1. Bekerjasama dengan BUMD atau food station untuk mempercepat penyaluran SPHP 2. Optimalisasi intervensi pasar melalui gerakan pangan murah (GPM) dengan melibatkan berbagai <i>stake holder</i> seperti TNI/Polri 3. Pengembangan pembayaran beras SPHP melalui sistem Cash on Delivery (COD) bagi saluran penjualan	WO Strategy 1. Perbaiki distribusi ke pasar dan saluran lainnya agar tidak terjadi kekosongan. 2. Memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan termasuk wilayah rawan kemacetan serta prioritas perjalanan kendaraan pengangkut pangan. 3. Bekerja sama dengan Himbara untuk proses permodalan pada saluran penjualan beras.
Ancaman (Treats) 1. Pedagang lebih memilih pemasok besar selain perum bulog karena kemudahan pelayanan 2. Pedagang/distributor banyak yang menolak beras kemasan 5 kg	ST Strategy 1. Melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan Langkah korektif atas indikasi adanya	WT Strategy 1. Meningkatkan kebijakan produksi (penyaluran pupuk yang tepat, memperbanyak rice milling unit) untuk menjaga harga beras dibawah HET.

3. Preferensi masyarakat lebih memilih beras yang pulen	ketidakwajaran kenaikan harga pangan.	2. Meningkatkan kualitas beras SPHP dan membangun kepercayaan masyarakat.
4. Inflasi beras tinggi dan Harga beras diatas HET (Harga Eceran Tertinggi)	2. Menerbitkan regulasi kemudahan dalam pertanggung jawaban penyaluran SPHP beras	3. Melakukan optimalisasi saluran penjualan dan segera melakukan update data mitra prum bulog
	3. Penugasan tambahan terkait penyaluran beras premium untuk memenuhi preferensi masyarakat	

Berdasarkan analisis TOWS pada matriks di atas beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten adalah:

1. SO Strategy:

- Bekerjasama dengan BUMD atau food station untuk mempercepat penyaluran SPHP
- Optimalisasi intervensi pasar melalui gerakan pangan murah (GPM) dengan melibatkan berbagai *stake holder* seperti TNI/Polri
- Pengembangan pembayaran beras SPHP melalui sistem Cash on Delivery (COD) bagi saluran penjualan

2. ST Strategy:

- Melakukan sinergi pengawasan bersama satgas pangan dan aparat penegak hukum untuk melakukan Langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga pangan.
- Menerbitkan regulasi kemudahan dalam pertanggungjawaban penyaluran SPHP beras
- Penugasan tambahan terkait penyaluran beras premium untuk memenuhi preferensi masyarakat

3. WO Strategy:

- Perbaiki distribusi ke pasar dan saluran lainnya agar tidak terjadi kekosongan.
- Memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan termasuk wilayah

rawan kemacetan serta prioritas perjalanan kendaraan pengangkut pangan.

- Bekerja sama dengan Himbara untuk proses permodalan pada saluran penjualan beras.

4. WT Strategy:

- Meningkatkan kebijakan produksi (penyaluran pupuk yang tepat, memperbanyak rice milling unit) untuk menjaga harga beras dibawah HET.
- Meningkatkan kualitas beras SPHP dan membangun kepercayaan masyarakat.
- Melakukan optimalisasi saluran penjualan dan segera melakukan update data mitra prum bulog

SIMPULAN

Evaluasi kebijakan CBP dalam SPHP di Perum Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten berdasarkan enam kriteria menunjukkan hasil belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan:

1. **Efektivitas:** Program efektif menekan inflasi, menjaga daya beli, dan mencegah kelangkaan. Penyaluran sesuai juknis (kemasan 5 kg), namun belum optimal karena distribusi lebih banyak ke ritel modern/distributor, sementara survei harga dilakukan di pasar tradisional. Penyaluran baru dimulai Juli–Desember 2025, seharusnya

- dilakukan sepanjang tahun sebagai buffer stock.
2. **Efisiensi:** Biaya distribusi tinggi karena lokasi padat dan retur tidak dapat ditagihkan ke anggaran pemerintah. Proses repack memakan waktu dan biaya, ada kerusakan beras akibat masa simpan panjang dan gudang. Penggunaan kredit bank membebani keuangan Bulog.
 3. **Kecukupan:** Volume beras sangat cukup, namun penyaluran lambat menurunkan kualitas dan meningkatkan biaya. Per 24 September 2025, stok nasional mencapai 3.877.703 ton, sedangkan stok di Kanwil DKI Jakarta dan Banten sebesar 325.542 ton.
 4. **Kesamaan:** Penyaluran merata tanpa diskriminasi, harga sesuai kualitas, dan pembelian mudah tanpa e-KTP. Namun, ketersediaan di ritel modern belum optimal, akses distribusi sulit, serta ada perubahan saluran dari juknis 2024 ke 2025.
 5. **Responsivitas:** Penyaluran sesuai kebutuhan dengan kemasan 5 kg. Masyarakat lebih memilih beras premium dan lokal yang pulen, namun pengadaan tidak selalu sesuai varietas. Respons Bulog terhadap kelangkaan cukup lambat karena menunggu arahan rapat koordinasi.
 6. **Kelayakan:** Kebijakan sesuai RPJMN karena menjaga stabilitas harga dan melindungi konsumen-produsen. Layak dijalankan, tetapi perlu peningkatan kecepatan distribusi dan kualitas beras. Praktik serupa di Malaysia, Thailand, dan Vietnam menunjukkan pentingnya target harga dan manajemen dari hulu ke hilir.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Aldillah, R. (2017). Strategi pengembangan agribisnis jagung di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 15(1), 43-66.
- Azman, A. B., Majid, M. A. A., & Zulkifly, M. I. (2024). Food supply and crisis management towards food security: A review through the lens of Malaysian micro-food businesses. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1397(1), 012029. doi:https://doi.org/10.1088/1755-1315/1397/1/012029
- Danil K, N. (2024). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gowa*. IPDN.
- Hermanto. (2014). *Peran Cadangan Beras Darurat Di Kawasan Asia Tenggara Role of Emergency Rice Reserve in Southeast Asia Region*.
- Herwiansyah, H. (2024). *Evaluasi Kebijakan Program Bantuanpangan Beras Di Kelurahan Pemurus Luar Kota Banjarmasin*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Husein, M. (2008). *Perum Bulog. Pangan*, 3.
- Ibrahim, S. N. K., Hidayati, F., Umaternate, R., & Taufiqurrokhman, T. (2024). Evaluasi Kebijakan Ketahanan Pangan Program Bantuan Beras Cadangan Pangan Pemerintah 2024. *Menara Ilmu*, 18(1), 76–85. https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5554
- Ibrohim, M., Ardiyansyah, F., & Rudyarta, R. (2025). Strategi Indonesia dalam Menekan Ketergantungan Impor Gandum dan Kedelai (2010–2023): Perspektif Ketahanan Ekonomi Nasional. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 2410-2420.

- Li, C. (2025). The evolution of food security in Japan—Based on an indicator evaluation system including climate change indicators. *PLoS One*, 20(2) doi:<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0317180>
- Montesclaros, J. M. L. (2025). Food security and crises in southeast asia: Is this time different? *Asia Policy*, 20(3), 13-22. Retrieved from <https://www.proquest.com/scholarly-journals/food-security-crises-southeast-asia-is-this-time/docview/3238449712/se-2>
- Rusono. (2019). *Strengthening Policy on Government Rice Stock Management*.
- Paisal, P. (2023). *Implementasi Kebijakan Pangan Studi Tentang Pengelolaan Hasil Jagung Di Kabupaten Jeneponto= Food Policy Implementation Study Of Corn Production Management In Jeneponto District* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Selepe, M. M. (2022). *The Paradigm Shift from Traditional Public Administration to Sustainable Public Administration African Journal of Development Studies (AJDS)*. *J-Gate*, 12(2), 99–129. <https://doi.org/10.31920/2634-3649/2022/v12n2a5>
- Setiawan, F. (2019). *Pengaruh Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Terhadap Administrasi Pembangunan Di Indonesia*. In *Politik dan Pemerintahan* (Vol. 8, Issue 2).
- Soma, A. (2019). *Strategi pelayanan kebijakan publik pada kelurahan semper timur kecamatan cilincing kota administrasi jakarta utara, UTS*. St. Louis: doi:<https://doi.org/10.31219/osf.io/eb7xj>
- Wowiling, V. G., Posumah, H. J., & Londa, V. Y. (2018). *Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera Di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).
- Abidin, S. Z. (2016). *Kebijakan publik*. Alexander. (1994). *Perencanaan Daerah Partisipatif*.
- Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek*. CV Pustaka Setia.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik (Terjemahan)*. Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Dye, T. R. (1975). *Policy Analysis and Political Science: Some Problems at the Interface* Thomas R. Dye. *Policy Studies and the Social Sciences*, 2, 281.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung). Tarsito. Library. Fis. Uny. Ac. Id/Opac/Index. Php.
- Ngusmanto. (2015). *Pemikiran Dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media, 165.
- Rangkuti, Freddy, 2006, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Septiani, S. (2020). *Administrasi Pembangunan*.
- Siagian, S. P. (2017). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*. Jakarta.
- Solihin, S. E. (2021). *Administrasi Pembangunan*. Jakad Media Publishing.
- Subarsono, A. G. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*.
- Sugiyono, P. D. (2013). *Metode penelitian manajemen*. Bandung: Alfabeta, CV.

- Winarno, B. (2012). *Kebijakan publik: teori, proses, dan studi kasus: edisi dan revisi terbaru*. Center For Academic Publishing Service.
- Pangan, U. (2012). UU Pangan. In *BPK*. Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2022 Tentang Ketahanan Pangan, KemenSesneg 649 (2002).
- Perpres. (2025). *Perpres Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2029*.
- Perpres Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Perubahan Perpres Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan (2017).